

# Penolakan Masyarakat Serangan Terhadap Kebijakan Desa Adat (Studi Kasus: Gerakan Penolakan Portal Retribusi Parkir Wisata Serangan Tahun 2021)

I Made Putra Wijaya<sup>1)</sup>, Kadek Dwita Apriani<sup>2)</sup>, Tedi Erviantono<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: madeputrawijaya2016@gmail.com<sup>1)</sup>, kadek.dwita88@unud.ac.id<sup>2)</sup>

tedierviantono@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study attempts to describe how the rejection of the parking retribution portal in Serangan Village will be carried out in 2021. The author uses conflict theory to portray how Ralf Dahrendorf argues that conflict involves a struggle to obtain rare goods from a resource. This theory aptly describes that conflicting interest groups compete for power. In this research, we will examine in more depth the forms of resistance based on conflicts that occur between authorities and the public as the object of implementation of a policy. Methods This study used a qualitative method with a descriptive-explanative type of research in which data collection techniques were carried out using in-depth interviews with stakeholders in Serangan Village. From this study it was found that the rejection was made by two banjars which disputed the parking portal policy, which was in accordance with Ralf Dahrendorf's theory regarding the struggle for resources in this case study was the interest in the portal installation program in Serangan Village which occurred due to lack of socialization, inappropriate program implementation and there is a mismatch of communication between local policy makers.*

**Keywords:** Rejection, Conflict, Serangan Village

## 1. PENDAHULUAN

Objek wisata Serangan merupakan salah satu kawasan strategis Kota Denpasar yang memiliki kepentingan signifikan dalam perekonomian kota atau wilayah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengklasifikasian dalam tiga segmen potensi wisata, yaitu daya tarik wisata bahari

seperti pasir putih dengan kondisi ombak yang tenang sehingga memungkinkan minat khusus wisatawan seperti memancing dan watersport. Kemudian terdapat potensi daya tarik rumput laut yang dikelola oleh masyarakat lokal Serangan. Selain bahari dan kuliner, terdapat juga daya tarik budaya yaitu Kampung Bugis yang dihuni oleh para nelayan asal Bugis yang bermukim sejak

zaman kerajaan (Widya, 2021). Wisata Serangan terletak di Kelurahan Serangan, dan Kelurahan Serangan terbagi menjadi dua daerah, yaitu Desa Adat Serangan dengan luas 48 Ha dan daerah milik Bali Turtle Island Development (BTID) seluas 476 Ha.

Potensi pariwisata yang besar membuat segala bentuk kebijakan pemerintah desa maupun kelurahan harus berdasarkan persetujuan masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal Serangan. Berdasarkan keterangan dari I Nyoman Tura selaku Ketua BUMDA (Badan Usaha Milik Desa), sebanyak 45 usaha restoran di wisata Serangan di kelola secara penuh oleh masyarakat lokal yang menyediakan makanan ikan bakar yang menawarkan konsep view pantai bagi wisatawan. Selain itu wahana rekreasi seperti melihat penyu, diving, dan tempat bersandarnya kapal-kapal pinisi, semakin memantapkan masa depan pariwisata dari Kelurahan Serangan.

Pada tahun 2021, masyarakat melakukan penolakan terhadap salah satu kebijakan desa adat Serangan yang dianggap merugikan masyarakat setempat. Tanggal 2 September, masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan dari dua (2) banjar dari desa adat Serangan, yaitu Banjar Kawan dan Banjar Kaja. Desa adat Serangan memiliki enam (6) banjar. Dari enam banjar terdapat dua banjar yang melakukan penolakan terkait pemasangan Portal Retribusi Parkir untuk keluar masuk kawasan wisata Serangan dengan tarif

beragam, yakni Rp. 2.000 untuk motor, Rp 5.000 untuk mobil dan Rp. 10.000 untuk truk. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya perselisihan antara masyarakat, petugas retribusi dan pihak pemerintah desa. Masyarakat menolak pemasangan empat (4) portal retribusi parkir yang telah dipasang oleh Perumda Bukti Praja Sewakadharmata atau PD Parkir kota Denpasar.

PD Parkir yang berwenang dalam pelaksanaan dan pemberian izin pemasangan Portal Retribusi Parkir melalui Made Ardana selaku Kepala Seksi Data dan Program mengatakan bahwa Portal merupakan sarana penunjang wisata di Serangan terutama untuk meningkatkan keamanan dan pendapatan desa. PD Parkir telah memberikan kajian akademis kepada pihak pemerintah desa baik kelurahan, adat, dan ketua lingkungan setempat. Secara teknis, pemungutan retribusi akan dilaksanakan tanggal 4 September 2021. Kemudian yang wajib membayar retribusi parkir adalah wisatawan yang berkunjung ke wisata Serangan. Khusus untuk masyarakat lokal tidak dipungut biaya dan bagi masyarakat yang menggunakan akses sekolah diberikan memberi kartu pelanggan dan memberikan data plat kendaraan kepada petugas retribusi agar dapat mengakses jalan ke daerah wisata serangan tanpa dipungut biaya. Kemudian terkait dengan penolakan masyarakat terkait portal tersebut, PD Parkir menyerahkan wewenang tersebut kepada pihak Bendesa Adat selaku pemohon pemasangan retribusi parkir. Akan tetapi, bendesa adat pada saat

dilaksanakannya penolakan tidak berada di lokasi karena dengan berada di luar kota.

Berdasarkan observasi penulis, penolakan terhadap portal retribusi parkir dikarenakan juga oleh sosialisasi yang kurang maksimal dari pihak desa terkait kebijakan ini. Hal ini mengingat pada saat kebijakan dibuat pada Februari 2022 dan masa pandemi, pihak pemerintahan kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat untuk mendengarkan sosialisasi. Kemudian dari pihak desa mengambil langkah untuk menghadirkan 2 orang perwakilan dari masing-masing banjar. Dalam sosialisasi belum tersampaikan sepenuhnya terkait skema retribusi parkir dan pembagian hasil dari retribusi. Hasil retribusi parkir secara keuntungan akan dibagi 30% untuk Badan Pendapatan Daerah kota Denpasar dan 70% diberikan kepada pemerintahan desa.

Sosialisasi yang minim akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga mengakibatkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Resistensi adalah sebuah fenomena yang merujuk kepada situasi sosial di mana terdapat pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikan. Hubungan antara satu pihak yang lemah dan pihak yang kuat sesungguhnya berada pada suatu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, maka pihak lemah yang berada pada struktur bawah berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak tertindas (Suriadi 2008:52).

Setelah resistensi yang dilakukan oleh dua banjar tersebut, sampai saat ini belum ada keputusan lanjutan terkait kelanjutan dari retribusi parkir di Desa Adat Serangan. Sehubungan dengan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait proses resistensi yang terjadi di masyarakat Serangan dan kemudian ingin melihat bagaimana resolusi konflik dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah adat, dan PD Parkir kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul penelitian “Penolakan Masyarakat Serangan Terhadap Kebijakan Desa Adat (Studi Kasus: Gerakan Penolakan Portal Retribusi Parkir Wisata Serangan Tahun 2021)”

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Teori Konflik Ralf Dahrendorf**

Dalam buku yang berjudul “*Class And Class Conflict In Industrial Society*”, Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik melibatkan perjuangan untuk mendapatkan barang langka dari suatu sumber daya. Dari sudut pandang penggunaan linguistik, hal itu secara tepat menggambarkan bahwa kelompok kepentingan yang bertentangan bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Teori konflik Ralf Dahrendorf lahir sebagai reaksi dari teori fungsionalisme struktural, karena teori tersebut tidak mengupas fenomena konflik secara lebih mendalam. Teori konflik adalah perspektif yang menilai masyarakat sebagai semacam sistem yang terbagi atas berbagai perbedaan kepentingan, di mana terdapat upaya untuk

menaklukkan komponen lain dengan tujuan memenuhi kepentingan lainnya. Teori ini merupakan kombinasi dari penerimaan, penolakan, dan modernisasi atas pemikiran sosiolog Karl Marx serta kombinasi pandangan Max Weber.

Teori konflik Dahrendorf sendiri memfokuskan pada sisi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik. Intensitas merupakan sebagai tingkat keterlibatan yang didalamnya meliputi tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari Bahasa latin "con" yang artinya bersama dan "figere" yang memiliki arti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial sama dengan benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang minimal harus melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik merupakan perselisihan atau persengketaan yang melibatkan dua atau lebih baik individu atau kelompok yang kedua pihak mempunyai keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan atau mengalahkan bahkan menysihkan.

Dahrendorf melihat konflik sebagai suatu bentuk adanya kepemilikan kekuasaan dan otoritas yang melahirkan pembagian kelas (R. Dahrendorf dalam Margaret M. Poloma, 2004). Lahirnya kekuasaan dan otoritas menimbulkan adanya pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Pada hubungan ini tercipta sebuah asosiasi yang pelaksanaannya memiliki kontribusi dalam timbulnya konflik. Timbulnya konflik yang dimaksud adalah berada dalam masyarakat yang berasal dari

konsensus yang telah ada sebelumnya. Konsensus tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang didasari oleh berbagai kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingannya sedangkan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan akan berjuang dan kepentingan mereka sering berbeda dengan si pihak penguasa dan bahkan bertentangan. Dasar baru dalam pembentukan kelas merupakan hasil dari kepemilikan otoritas dan kekuasaan. Dalam struktur tersebut terdapat kelompok yang memegang kekuasaan dan kelompok yang tidak berpartisipasi dalam proses penundukan. Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan tunduk pada struktur itu (Margaret M. Poloma, 2004, hlm 135). Pada pertentangan yang dimaksud sering kali disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan mengakibatkan adanya kelompok pertentangan yang memperjuangkan kepentingannya begitu juga dengan pihak sebaliknya. Jadi konflik sosial menurut Dahrendorf dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang saling berkonflik. Ralf Dahrendorf melihat pelaku konflik adalah kelompok semu (quasi group) yaitu para pemegang kekuasaan dengan kepentingan yang sama terbentuk sehingga munculnya kelompok kepentingan, kemudian kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok

semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai organisasi, tujuan, program serta anggota yang jelas. Kelompok inilah yang menjadi sumber konflik dalam masyarakat.

Menurut Ralf Dahrendorf masyarakat merupakan sekumpulan individu yang setiap saat tunduk akan proses perubahan dan pertikaian (konflik), dalam sistem sosial terdapat konflik dan juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh pemilik kekuasaan, sehingga penguasa menekankan pemaksaan terhadap anggotanya dan menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Kekuasaan secara sosiologis dimanifestasikan dalam bentuk wewenang legal formal dan modal-modal ekonomi serta budaya. Dalam konteks konflik industrial kekuasaan lebih didefinisikan oleh legal formal negara dan modal ekonomi pasar. Kekuasaan legal formal negara yang mampu bekerja sama dengan kekuasaan ekonomi pasar yang bisa menentukan keberhasilan ekonomi suatu negara. Pada pengertian struktural ini dapat dilihat mengenai bagaimana dua pihak pemilik kekuasaan tersebut melakukan penyimpangan untuk kepentingan dan tujuan masing-masing pemegang kekuasaan yakni pemerintah dan pemegang ekonomi pasar.

Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki sisi kehidupan yang ganda. Di satu sisi masyarakat merupakan makhluk sosial yang menjunjung nilai kerja sama, tetapi pada suatu titik tertentu mereka memiliki kecenderungan untuk menciptakan konflik. Sama halnya dengan Marx, Dahrendorf menempatkan masyarakat sebagai unit analisis utama dalam gagasan teorinya. Masyarakat termasuk sebuah kesatuan sistem dengan struktur sosial yang luas. Sehingga, kajian mengenai konflik pada dasarnya terletak pada otoritas yang ada di dalam masyarakat. Hubungan otoritas yakni antara penguasa dengan bawahan telah melahirkan kelas sosial atau stratifikasi dalam masyarakat, fenomena ini di maknai sebagai suatu realita sosial. Pada kesimpulannya, Dahrendorf mengatakan jika perbedaan kelas tergolong sumber dari konflik dan perubahan sosial.

#### 1. Otoritas

Otoritas memiliki definisi sebagai suatu istilah yang menggambarkan legitimasi atau klaim hak untuk menjalankan kekuasaan. Perspektif Dahrendorf menjelaskan jika masyarakat terdiri dari beberapa unit, kemudian unit-unit yang ada di dalam masyarakat itu merupakan bagian dari asosiasi individu yang berada di bawah kendali otoritas.

#### 2. Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan

Dahrendorf membagi kelompok konflik menjadi dua kubu, yakni kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu (quasi group) adalah pemegang

kontrol kuasa yang memiliki kesamaan kepentingan. Sementara itu kelompok kepentingan (interest group) merupakan bagian dari kelompok semu dengan lingkup yang lebih besar.

### 3. Konflik dan Perubahan

Pembahasan berikutnya yang ditekankan oleh Dahrendorf yaitu korelasi antara konflik dan perubahan. Yang dimaksud perubahan disini ialah perubahan sosial dengan ditandai adanya perubahan struktur di dalam masyarakat. Pemikiran Dahrendorf ini juga di latarbelakangi oleh gagasan Coser yang menyebutkan bahwa konflik memiliki fungsi dalam melindungi status quo.

Berdasarkan teori tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin mengulas lebih dalam mengenai bentuk resistensi berdasarkan konflik yang terjadi antara pemegang otoritas dan masyarakat selaku objek implementasi dari sebuah kebijakan. Secara konflik, fenomena penolakan portal retribusi parkir ini melibatkan pihak banjar yang menolak, pihak banjar setuju, pemerintahan desa Adat, dan PD Parkir kota Denpasar. Terdapat dua (2) banjar yang menolak pemasangan portal dan otoritas setempat dianggap minim sosialisasi terkait pemasangan tersebut. Kemudian dari pihak otoritas, menjelaskan bahwa sosialisasi tidak maksimal karena masih dalam situasi covid-19 yang membuat pemerintah desa Adat tidak bisa mengumpulkan masyarakat sepenuhnya dan mengambil skema perwakilan dari setiap banjar.

Secara konflik fenomena ini erat kaitannya dengan pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai karena resistensi terjadi akibat perbedaan kepentingan. Dalam perspektif otoritas desa adat, menilai pemasangan portal akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan desa dan hal ini di konfirmasi oleh PD Parkir Kota Denpasar selaku pihak otoritas daerah yang memberikan izin pemasangan. Pihak yang melakukan resistensi, merasa tidak terlalu dilibatkan dalam proses kebijakan dan minim sosialisasi oleh otoritas membuat konflik ini masih terus berlanjut. Hal ini tentunya meyakinkan stratifikasi sosial terjadi melalui otoritas sebagai penguasa dengan bawahan sebagai yang ikut dalam aturan otoritas.

## LANDASAN KONSEPTUAL

### **Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Desa Adat**

Resistensi adalah sebuah fenomena yang merujuk kepada situasi sosial di mana terdapat pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya. Hubungan antara satu pihak yang lemah dan pihak yang kuat sesungguhnya berada pada suatu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, maka pihak lemah yang berada pada struktur bawah berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak tertindas (Suriadi 2008:52).

Masyarakat Desa Adat Serangan yang terdiri- dari Banjar Kawan dan Banjar Kaja melakukan resistensi terhadap

pemasangan portal retribusi parkir wisata Serangan. Pihak tersebut merasa dirugikan karena tidak mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait pemasangan portal dan tidak ada kesepakatan dengan masyarakat terkait hal ini. Menarik untuk melihat apakah ada alasan lain dan pihak tertentu lagi yang terlibat dalam resistensi atas kebijakan desa Adat Serangan

### Resolusi Konflik Portal Retribusi Parkir

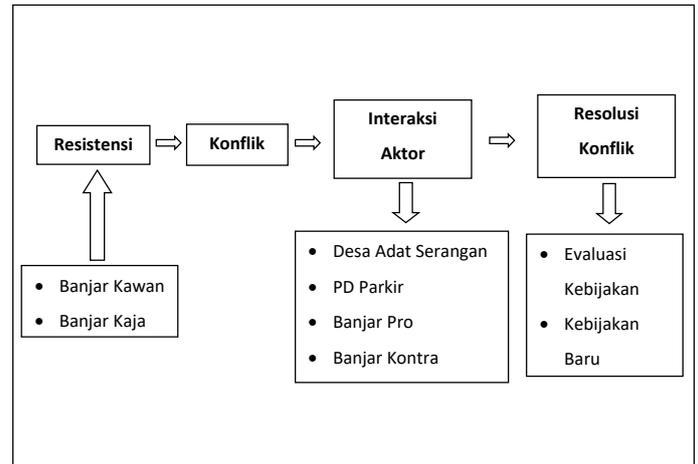
Resolusi konflik (conflict settlement) adalah upaya menyelesaikan konflik baik secara langsung (negosiasi) maupun melalui mediasi secara komprehensif artinya bahwa kesepakatan yang dibangun bukan hanya berkaitan dengan dampak yang muncul tetapi juga berkaitan dengan sumber permasalahannya Kemudian Interaksi antar aktor dalam penyelesaian konflik merupakan salah satu penentu tercapainya resolusi konflik (Santosa, dalam Hadi, 2006:21).

Fenomena portal retribusi parkir di Serangan memiliki keunikan tersendiri. Di era digitalisasi dan transparansi, tentunya memerlukan kolaborasi melalui interaksi berbagai pihak agar terealisasi konsep tersebut. Portal retribusi parkir merupakan salah satu contoh sarana pendukung dalam kemajuan pariwisata guna mengikuti era digitalisasi dan transparansi pendapatan desa melalui retribusi parkir wisatawan. Resolusi konflik dalam permasalahan ini memerlukan peran otoritas desa untuk meyakinkan masyarakat, baik melalui mediasi atau sosialisasi kembali. Selain itu, dibutuhkan pula interaksi antar pihak yang

melakukan resistensi dan pihak yang membuat kebijakan agar resolusi konflik dari permasalahan tersebut dapat tercapai.

### KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis ingin meneliti konflik di Desa Serangan yang melibatkan antara kelompok masyarakat melalui dua banjar yaitu Banjar Kawan dan Banjar Kaja dengan Pemerintah Desa Adat Serangan. Konflik ini menimbulkan resistensi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Resistensi ini akibat dari adanya pemasangan portal retribusi parkir di wilayah tersebut. Konflik ini melibatkan interaksi antara Desa Adat selaku pemegang otoritas di desa, kemudian ada PD Parkir Kota Denpasar selaku institusi penyediaan portal parkir dan banjar yang sepakat maupun tidak dengan pemasangan portal tersebut. Peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait bentuk resistensi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan bagaimana resolusi konflik dari permasalahan ini. Apakah akan tetap

dengan keputusan sebelumnya atau menghasilkan kebijakan baru.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksplanatif dalam menjelaskan resistensi masyarakat dan resolusi konflik terhadap kebijakan pemerintah desa adat mengenai penolakan portal retribusi parkir wisata Serangan Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis yang berfokus pada resistensi masyarakat dan resolusi konflik terhadap kebijakan pemerintah desa adat mengenai penolakan portal retribusi parkir wisata Serangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini mengambil beberapa informan penting yang mengetahui persoalan terkait skripsi penulis, antara lain: Bendesa Adat, Kelian Banjar yang menolak, Kelian Banjar yang setuju, Pimpinan PD Parkir Kota Denpasar, Pemimpin Gerakan/Aktivis.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Hasil Temuan**

Berdasarkan hasil temuan pada strategi gerakan sosial, pada dasarnya

diselipkan juga kepentingan pribadi dari aktor gerakan.

Dalam teori konflik dijelaskan bahwa perselisihan terjadi antar dua atau lebih individu atau kelompok. Dalam penolakan portal ini terjadi perselisihan antara dua kelompok di Desa Serangan yaitu kelompok yang setuju dengan pembangunan portal parkir dan kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan portal parkir. Dua kelompok ini memiliki pertimbangan atas pilihan-pilihan yang telah mereka tetapkan tersebut.

Teori konflik Dahrendorf sendiri memfokuskan pada sisi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik. Intensitas merupakan sebagai tingkat keterlibatan yang didalamnya meliputi tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Konflik secara etimologis berasal dari Bahasa latin "con" yang artinya bersama dan "figere" yang memiliki arti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial sama dengan benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang minimal harus melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik merupakan perselisihan atau persengketaan yang melibatkan dua atau lebih baik individu atau kelompok yang kedua pihak mempunyai keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan atau mengalahkan bahkan menyingkirkan.

Dalam kasus penolakan portal di Desa Serangan terdapat dua banjar yang tidak setuju diadakannya program portal parkir ini, namun banjar lainnya mengaku setuju dan menganggap bahwa program

yang bagus hendaknya didukung oleh masyarakat. Dari temuan di lapangan ditemukan bahwa Banjar Kaja dan Banjar Kawan tidak setuju dengan pembangunan portal ini karena posisi yang diletakkan di wilayah pemukiman, sementara ada akses masyarakat yang akan terhambat jika portal dipasang. Selain itu kurangnya sosialisasi menjadi salah satu pemicu bahwa program ini dinilai tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Dalam teori konflik dijelaskan bahwa perselisihan menciptakan kelas-kelas di antaranya. Dalam kasus penolakan ini juga tercipta perbedaan kelas antar pejabat desa dan pejabat banjar. Hal ini menjadi sorotan bagi pejabat banjar karena kebijakan yang datang dari bendesa adat dinilai kurang berdampak bagi masyarakat. Selain itu juga melihat latar belakang kepemimpinan desa adat yang berkaitan dengan kasus pengelolaan LPD.

Dalam teori konflik Dahrendorf juga dijelaskan tiga poin yang menunjang teori ini seperti:

#### 1. Otoritas

Otoritas memiliki definisi sebagai suatu istilah yang menggambarkan legitimasi atau klaim hak untuk menjalankan kekuasaan. Perspektif Dahrendorf menjelaskan jika masyarakat terdiri dari beberapa unit, kemudian unit-unit yang ada di dalam masyarakat itu merupakan bagian dari asosiasi individu yang berada di bawah kendali otoritas. Dalam kasus Desa Serangan masyarakat yang melakukan penolakan terbagi dalam unit banjar dimana

dari unit ini ada dua kelompok banjar yaitu Banjar Kaja dan Banjar Kawan yang tidak setuju dengan program pembangunan portal ini.

#### 2. Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan

Dahrendorf membagi kelompok konflik menjadi dua kubu, yakni kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu (quasi group) adalah pemegang kontrol kuasa yang memiliki kesamaan kepentingan. Sementara itu kelompok kepentingan (interest group) merupakan bagian dari kelompok semu dengan lingkup yang lebih besar. Dalam hal ini, dua kelompok kepentingan dapat dilihat dari pemegang kuasa yaitu Bendesa Adat dimana ia termasuk ke dalam kelompok semu karena menjadi pemegang kontrol kuasa dan memiliki kesamaan kepentingan. Sementara itu kelompok kepentingan merupakan banjar yang merupakan bagian dari desa namun memiliki kepentingan yang terbagi menjadi dua yaitu setuju dan tidak setuju mengenai program portal parkir ini.

#### 3. Konflik dan Perubahan

Dalam teori konflik juga diketahui bahwa terdapat konflik dan perubahan. Pembahasan konflik dan perubahan ditegaskan oleh Dahrendorf dengan korelasi antara konflik dan perubahan. Yang dimaksud perubahan disini ialah perubahan sosial dengan ditandai adanya perubahan struktur di dalam masyarakat. Dalam kasus ini terjadi perubahan dalam struktur masyarakat dimana mereka terbagi ke dalam kelompok yang setuju dan tidak

setuju dengan pembangunan portal. Hal ini menjadi salah satu perubahan social karena kepentingan yang ada di dalam masyarakat menjadi berbeda akibat dari rencana penerapan portal parkir ini.

Kasus di Desa Serangan menjadi menarik, bagaimana kasus penolakan terjadi antara dua banjar dengan kebijakan desa adat. Resolusi konflik pun coba dilakukan dengan menunda terlebih dahulu program portal parkir ini. Langkah penundaan ini menjadi strategi jangka pendek untuk kemudian merumuskan kembali rencana jangka panjang agar tidak terjadi penolakan. Pihak eksternal, yaitu pemerintah juga menyarankan untuk melakukan penundaan. Di lapangan sendiri tetap dilakukan kegiatan kantong parkir manual sembari menunggu kebijakan selanjutnya.

Dalam kasus pembangunan portal parkir di Desa Serangan perlu dikaji lebih dalam apa yang menjadi sumber atas permasalahan pembangunan parkir, sebab dalam wacana di lapangan ditemukan bagaimana kelompok pro dan kelompok kontra sama-sama memiliki kekuatan dalam sisi argumentasi. Hal ini yang kemudian perlu disoroti dari sisi pisau analisa. Penulis menggunakan teori resistensi konflik yang ditelaah dalam buku yang berjudul "Class And Class Conflict In Industrial Society", dalam buku ini Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik melibatkan perjuangan untuk mendapatkan barang langka dari suatu sumber daya. Maka dari apa yang telah terjadi di lapangan diketahui bahwa suatu barang langka dari sebuah sumber daya ini

dapat berupa hal-hal yang sifatnya materiil dimana dalam kasus ini dapat dilihat bagaimana kebijakan pemasangan portal telah merubah tatanan dan kebiasaan yang terjadi dari sisi retribusi. Tatanan ini yang kemudian menimbulkan perkara dimana sisi pro menganggap bahwa pembangunan portal parkir berfungsi menata tempat wisata dan menjauhi penarikan parkir dari pungli. Sementara itu sisi kontra menganggap bahwa pembangunan retribusi parkir ini kemudian menghilangkan dan mempersulit akses kendaraan lokal masuk ke wilayah rumahnya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan wilayah yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan awal

Akhirnya dalam pisau analisa ini dapat dilihat bagaimana konflik bisa terjadi dan resistensi juga dilakukan masyarakat dalam hal ini kelompok kontra mencoba untuk mempertahankan areanya dengan melakukan perlawanan orasi dan mobilisasi massa. Menurut Dahrendorf ini menjadi hal yang kemudian menimbulkan resistensi dari masyarakat karena perebutan kepentingan dari sisi pembangunan portal parkir. Dari konflik yang timbul dan resistensi yang dilakukan para kelompok ini penulis juga melihat bagaimana resolusi konflik coba dilakukan oleh berbagai stakeholder yang terhubung dalam konflik ini.

Resolusi konflik (conflict settlement) dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Resolusi konflik adalah upaya menyelesaikan konflik baik secara langsung (negosiasi) maupun melalui mediasi secara komprehensif artinya bahwa kesepakatan yang dibangun bukan

hanya berkaitan dengan dampak yang muncul tetapi juga berkaitan dengan sumber permasalahannya Kemudian Interaksi antar aktor dalam penyelesaian konflik merupakan salah satu penentu tercapainya resolusi konflik (Santosa, dalam Hadi, 2006:21).

Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana resolusi konflik coba dilakukan terutama dari pihak ketiga yaitu pemerintah selaku pemberi kewenangan dalam pembangunan portal ini. Akhirnya ditempuh jalan negoisasi dan sosialisasi ulang kepada warga Serangan terutama di beberapa banjar yang menolak hadirnya portal ini. Selain itu langkah lain juga diambil seperti penghentian pengoperasian portal selama beberapa waktu. Hal ini kemudian dilakukan untuk meredakan massa dan untuk mencari solusi akhir yang diinginkan desa dalam pembangunan portal parkir, meskipun pararem desa sudah diterbitkan namun pihak pemerintah ingin meyakinkan ulang dengan sosialisasi kepada masyarakat apakah mereka sepakat terhadap pembangunan portal parkir atau tidak.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini ditemukan hasil penelitian berupa yang pertama penolakan masyarakat terkait penerapan portal parkir di Desa Serangan menjadi salah satu penyebab konflik muncul dan masyarakat melakukan resistensi. Kondisi ini dipicu oleh berbagai macam hal seperti; minimnya sosialisasi terkait penerapan portal parkir, belum meratanya pembagian kartu member

bagi masyarakat desa. Melalui penelitian ini penulis melihat bagaimana penolakan yang dilakukan masyarakat terkait dengan aturan baru tersebut salah satunya dengan melakukan aksi demo untuk menuntut kejelasan penerapan portal parkir tersebut.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kondisi yang memicu penolakan terjadi seperti:

1. Minimnya sosialisasi terkait penerapan portal parkir, belum meratanya pembagian kartu member bagi masyarakat desa.
2. Penempatan posisi portal parkir yang dianggap mengganggu masyarakat
3. Terdapat dua kelompok yaitu kelompok setuju dan tidak setuju dengan pembangunan portal.
4. Resolusi konflik untuk sementara dilakukan dengan penundaan penerapan portal parkir ini.
5. Terdapat kepentingan yang berbeda antara kebijakan bendesa adat dengan kelian banjar.

### **Saran**

Dari penelitian ini, penulis melihat bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini seperti kurangnya dokumen-dokumen yang dapat membantu proses analisa dan sejarah konflik ini. Sebagian besar data yang dikumpulkan didapatkan dari wawancara dan data sekunder di internet. Untuk itu, penulis lebih menekankan penelitian ini pada kronologi konflik yang terjadi di Desa Serangan. Penulis menyarankan perlunya kajian lebih lanjut terhadap penelitian penolakan portal

parkir di Desa Serangan ini. Ada beberapa kajian yang dapat dikembangkan dan digali lebih dalam seperti:

1. Meneliti kembali sejarah atau historisitas dari konflik pemasangan portal di Desa Serangan.
2. Menggali lebih dalam bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra terhadap pemasangan portal parkir.
3. Meneliti lebih lanjut resolusi konflik yang dilakukan di Desa Serangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Budiarjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri. Sebuah Analisa-Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harrison, L. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- ### Sumber Jurnal atau Penelitian
- Arianto, A. (2014). Festival Jogokali: Resistensi Terhadap Penggusuran Dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1 No. 2. <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/16>
- D'Abbs, P. (2015). Reform and Resistance: Exploring the Interplay of Alcohol Policies With Drinking Cultures and Drinking Practices. *Sage Journals*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0091450915587535>
- Dewi, N.M. (2015). Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1. <https://repository.unair.ac.id/17602/>
- Dewi, O. (2007). Resistensi Petani : Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Informasi*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/976/0>
- Fringka, Y. (2016). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21(2).

- Nelson, K. (2002). Language Policies And Minority Resistance In China. School of International and Public Affairs, Columbia University. <https://xiteseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi10.1.1.581.5868&rep1&typepdf>
- Pipit, G. (2013). Konflik Dan Resistensi Warga Pendatang Etnis Nias Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/7548/>
- Sipahutar, W.A. (2021). Interaksi Antar Aktor Dalam Pengelolaan Parkir Di Kawasan Pantai Matahari Terbit tahun 2021". Jurnal Nawala Politika. ISSN:2827-9131. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/79851>.
- Sitorus, D.M. (2022). Politik Ekonomi Dalam Kebijakan Pengelolaan Parkir Pada Mini Market Di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Jurnal Nawala Politika. ISSN 2827-9131. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/89502>
- 01611/warga-serangan-protessportal-retribusi-parkir pada tanggal 22 November 2022
- Kumparan. 2021. Masuk Desa Wisata Serangan Bali Ditarik Retribusi Parkir, Warga Ramai-ramai Demo. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/masuk-desa-wisata-serangan-Bali-ditarik-retribusi-parkir-warga-ramai-ramai-demo-1wRzaFdr4KL/full> pada 22 November 2022
- Bali.idntimes.com. 2021. 10 Potret Demo Warga Serangan Denpasar Tolak Portal Masuk Desa Wisata. Diakses dari: <https://Bali.idntimes.com/news/Bali/ayu-afria-ulita-ermalia/potret-demo-warga-serangan-denpasar-tolak-portal-masuk-desawisata?page=all> pada 22 November 2022

### Sumber Artikel

- Kemenparekraf.go.id. 2022. Diakses dari: <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/serangan> pada tanggal 21 November 2022
- NusaBali.com. 2022. Warga Serangan Protes Portal Retribusi Parkir. Diakses dari: <https://www.nusaBali.com/berita/1>